

## Analisis Peran dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kota Batam

Novi Warni <sup>a,1\*</sup>, Timbul Dompok <sup>b,2</sup>

<sup>ab</sup> Universitas Putera Batam, Batam, Indonesia

<sup>1\*</sup> [pb191010033@upbatam.ac.id](mailto:pb191010033@upbatam.ac.id), <sup>2</sup> [Timbul.Dompok@puterabatam.ac.id](mailto:Timbul.Dompok@puterabatam.ac.id)

### INFO ARTIKEL

### ABSTRACT

**Key word:**  
Role, Function, General  
Election Commission,  
Political Participation,  
Public

*This research aims to analyze the contribution of the Batam Election Commission (KPU) in enhancing public participation in politics. A review of literature and a qualitative descriptive method were employed in this study. Examination of relevant scholarly works representing various interconnected research served as the technique for secondary data collection. According to the research, the Election Commission plays a crucial role in reducing public abstention from politics. The findings indicate that the level of political participation in the Batam community is somewhat unstable each year, as evidenced by fluctuating voter turnout. Voter abstention represents a form of apathy towards politics among the Batam community. Factors contributing to low political awareness and literacy among the public, ineffective efforts in socialization by the KPU, uncertainty regarding candidate legitimacy, and public trust in the government are identified as causes of reduced political involvement. Therefore, the role and function of the Election Commission are pivotal in efforts to enhance and stabilize public political engagement, including through the dissemination of Political Education information to the community.*

### INTISARI

**Kata kunci:**  
Peran, Fungsi, Komisi  
Pemilihan Umum,  
Partisipasi Politik,  
Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kontribusi KPU di Batam dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik. Tinjauan literatur dan metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pemeriksaan terhadap karya ilmiah terkait yang mewakili berbagai penelitian yang saling berhubungan merupakan teknik pengumpulan data sekunder. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan penting dalam mengurangi abstain masyarakat dari politik, menurut penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat partisipasi politik Masyarakat kota Batam bisa dikatakan kurang stabil setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya angkat golput yang cenderung berubah-ubah. Adanya golput sebagai bentuk dari sikap apatis Masyarakat batam terhadap politik. Rendahnya kesadaran politik masyarakat kurangnya literasi politik masyarakat, tidak efektifnya upaya sosialisasi yang dilakukan KPU, belum terjaminnya legitimasi calon, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keterlibatan politik masyarakat. Oleh karena itu, peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat penting dalam upaya meningkatkan dan menstabilkan keterlibatan politik masyarakat, salahsatunya dengan memberikan informasi tentang Pendidikan Politik kepada masyarakat.

Diterima : 03-06-2024

Dipublish : 29-06-2024

Copyright © 2024 (Novi Warni). All Right Reserved

\* Korespondensi Penulis: [pb191010033@upbatam.ac.id](mailto:pb191010033@upbatam.ac.id)

\* DOI : 10.53682/administro.v6i1.9486

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara yang menganut struktur pemerintahan demokratis dan memperjuangkan supremasi yang berpusat pada rakyat. Demokrasi dapat didefinisikan sebagai demokrasi kerakyatan yang terdiri dari perangkat keras yang diidentifikasi sebagai triad politik yang terdiri dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif [1]. Salah satu landasan terpenting demokrasi adalah pemilihan umum. Perannya yang terkonsentrasi dalam memisahkan sistem politik demokratis dari sesuatu yang tidak jelas dalam berbagai definisi yang diajukan oleh para peneliti. Salah satu konsep demokrasi pertama dikemukakan oleh Joseph Schumpeter (kaum Schumpeterian), yang menganggap kebebasan dan jangka waktu sebagai prasyarat utama bagi sistem politik demokratis [2].

Status pemilu ditingkatkan dalam kaitannya dengan demokrasi kontemporer. Penelitian akademis mengenai demokrasi mengidentifikasi dua kategorisasi besar, yaitu gagasan minimum dan maksimum. Lebih penting dalam hal demokrasi prosedural Dalam wacana bahasa Indonesia, demokrasi minimal mengacu pada sistem politik.

Melakukan transisi kekuasaan secara teratur melalui sistem pemilu yang bebas, terbuka, dan berskala global (tanpa memandang ras, agama, etnis, atau gender). Sementara itu, demokrasi maksimal, yang juga dikenal sebagai demokrasi substantif, berpendapat bahwa pemilihan umum yang sederhana tidak akan cukup kecuali hak-hak sipil dan nilai-nilai dasar pluralistik dilindungi [3]

Jika ditelisik lebih jauh, kedua pandangan tersebut sepakat bahwa prasyarat dasar demokrasi adalah pemilihan umum. Akibatnya, sebuah negara yang menjanjikan pluralisme dan kebebasan sipil namun tidak sering melakukan pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum, tidak dapat mengklaim dirinya demokratis. Meskipun terdapat sejumlah keberatan yang dilontarkan terhadap sistem ini, posisi pemilihan umum tetap penting dalam perdebatan demokratis [4].

Di tengah sikap apatis masyarakat terhadap Pemilu tersebut, komisi pemilihan umum menghadapi tantangan berat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akar rumput dalam rangka menggunakan hak politik dan Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu ini. Oleh karena itu, dibutuhkan orang-orang yang benar-benar tidak memihak dan peduli terhadap proses demokrasi di masyarakat sebagai anggota komisi pemilihan umum. Mereka tidak mempunyai konflik kepentingan yang memungkinkan mereka mencemari proses demokrasi di masyarakat, apalagi memanfaatkannya. Tidak ada keuntungan pribadi, yang ada hanyalah kemampuan untuk memantau perilaku anggota komunitas dengan cara yang memungkinkan mereka membuat keputusan yang tepat saat memberikan suara [5].

Namun demikian, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya

pemilu yang jujur dan adil, maka pihak-pihak lain, khususnya yang berkompeten dalam pemilu, terutama partai politik peserta pemilu, harus mendukung hal tersebut. Partai politik berpartisipasi dalam praktik pemilu yang merugikan proses demokrasi. Upaya komisi pemilihan umum akan sia-sia jika para politisi terus melakukan politik uang, sehingga dapat melemahkan penanaman pemahaman yang telah terbangun di masyarakat mengenai demokrasi dan pemilu yang adil dan jujur.

Ketika individu atau organisasi berpartisipasi dalam proses pemilihan pemimpin negara dan mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kebijakan publik, mereka terlibat dalam keterlibatan politik. Pemilihan kepala daerah (pilkada) pada jabatan-jabatan seperti gubernur, wakil gubernur, bupati, walikota, dan wakil walikota merupakan salah satu bentuk aksi politik. Di negara demokratis, hal ini bisa dilakukan. Namun, tidak semua orang sadar berpolitik karena berbagai alasan, termasuk kurangnya pendidikan, kurangnya sosialisasi, dan stigma "politik" yang terkait dengannya. Masyarakat Indonesia umumnya apatis terhadap dunia politik karena keinginan untuk mendapatkan kekuasaan [5]

KPU adalah garis pertahanan pertama bagi suatu negara. Komisi ini mempunyai komunikasi langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas pada saat pemilu, selain berkomunikasi dengan partai politik yang terlibat. Untuk meminimalisir golputnya masyarakat, peran KPU harus dioptimalkan. Kelompok kulit putih, atau abstain, adalah tindakan memberikan suara menentang pemungutan suara dengan suaranya. Golput muncul ketika mahasiswa menentang rezim Orde Baru dengan tidak ikut serta dalam pemilu tahun 1971 [6].

Berdasarkan temuan di lapangan, didapati bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat kota Batam dapat dikatakan belum stabil sepenuhnya. Masalahnya masih ada golput, tidak efektifnya upaya sosialisasi yang dilakukan KPU serta rendahnya kesadaran politik masyarakat terhadap keterlibatan politik. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk untuk meneliti tentang "Analisis Peran dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kota Batam

## 2. Metode Penelitian

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menyelidiki bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendorong keterlibatan warga dalam proses politik. Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah "penelitian untuk menggali dan memahami makna yang diyakini oleh sejumlah individu atau kelompok orang yang muncul dari permasalahan sosial atau kemanusiaan." [7]

Perumusan pertanyaan, pengumpulan data dari partisipan, distribusi data induktif (dimulai dari tema khusus dan berlanjut ke tema umum), dan interpretasi data merupakan bagian dari metode penelitian kualitatif [8]. Metode pengumpulan informasi bergantung pada data sekunder, yang dikumpulkan dari sumber yang memiliki reputasi dan relevan seperti buku, jurnal, dan artikel.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Keterlibatan individu dalam aktivitas politik pada berbagai tingkat sistem politik disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik adalah upaya kolaboratif warga negara untuk memilih pemimpin mereka dan membentuk kebijakan publik. Upaya ini didorong oleh kesadaran bahwa mereka akan bertanggung jawab untuk hidup berdampingan sebagai bangsa dalam bangsa [9]. Partisipasi politik dalam masyarakat diartikan sebagai upaya warga negara untuk mempengaruhi keputusan politik yang diambil oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai warga negara [10]

Setiap Negara telah mengembangkan budaya politik bagi masyarakatnya untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma, termasuk dalam bidang politik, dimana anggota masyarakat akan mencoba belajar tentang bagaimana seharusnya sistem politik bekerja dan apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap warganya selama proses pembangunan [11].

Seiring berjalannya waktu, sikap politik masyarakat membentuk suatu budaya tertentu, yaitu budaya politik. Budaya politik mempunyai kualitas atau standar tersendiri yang menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap aktivitas politik di suatu negara.

Kriteria ini memungkinkan kita untuk mengklasifikasikan budaya politik ke dalam tiga kategori berbeda. Tiga kategori budaya politik yang diidentifikasi oleh Almond dan Verba adalah: paroki, subjek, dan partisipan. Budaya politik paroki dicirikan oleh fokus geografis dan jangkauan skala kecil. Ada bagian dari budaya politik yang membahas topik-topik yang kurang diperhatikan atau tidak disadari oleh masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, sistem politik saat ini sangat dipengaruhi oleh Budaya Politik Partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran individu akan hak dan tanggung jawabnya [12]

Peneliti menetapkan ada tiga peranan dan dua fungsi komisi pemilihan umum (KPU) dalam upaya meningkatkan partisipasi Masyarakat terhadap politik yaitu peranan kearifan, peranan strategi, peranan alat komunikasi, fungsi pengawas penyelenggara pemilu, dan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat.

#### 3.1 Peran Sebagai Kearifan

Kesimpulan dari berbagai sumber dan dukungan pengumpulan literatur menunjukkan

bahwa hal tersebut diadopsi oleh KPU Kota Batam dalam rangka mendorong partisipasi karena persiapan yang sudah sangat matang. Menyiapkan rangkaian kegiatan secara lengkap sesuai peraturan dan bantuan penyelenggaraan simulasi pelaksanaan pemilu bagi masyarakat. Hal ini tidak lepas dari kegiatan-kegiatan di atas yang dilakukan di dalam KPU Kota Batam, Ketua KPU, sangat membantu dalam mengkoordinasikan dan memperhatikan setiap komisioner dan sekretariat KPU agar pemilu dapat terlaksana dengan lancar. Hal ini tidak dilakukan secara asal-asalan, melainkan sesuai dengan arahan dan perintah pimpinan tinggi yang juga diatur dengan norma-norma yang telah ditetapkan.

#### 3.2 Peran Sebagai Strategi

Jaringan relawan demokrasi yang dibentuk KPU Kota Batam penting dalam membantu KPU dalam komunikasi public, berdasarkan keputusan KPU untuk melakukan sosialisasi. Sepuluh hal penting tersebut adalah sebagai berikut:

1. basis keluarga
2. basis pemuda
3. basis Pemuda
4. dasar disabilitas
5. basis marginal
6. basis Perempuan
7. kebutuhan dasar khusus
8. basis agama
9. basis komunitas
10. internet/netizen berbasis warga.

Karena merupakan sumber informasi yang paling mudah diakses, sekolah harus menjadi fokus upaya sosialisasi, dengan fokus pada sekolah pemantauan KPU Kota Batam. Mengingat terdapat sejumlah kecamatan terpencil dan terpencil di Kota Batam yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi dan faktor-faktor lain yang menghambat keterlibatan masyarakat, maka KPU berkonsentrasi pada jaringan sekolah di wilayah tersebut karena lebih rentan mengalami krisis demokrasi.

#### 3.3 Peran Sebagai Alat Komunikasi

Dalam skenario ini, penjangkauan KPU tidak diragukan lagi merupakan cara paling sukses untuk memperluas keterlibatan masyarakat di Kota Batam. Namun untuk berjaga-jaga Berdasarkan temuan penulis, KPU saat ini melakukan sosialisasi melalui dua cara berbeda, antara lain penggunaan media sosial dan penggunaan platform media sosial seperti Instagram, Website, YouTube, Facebook, Twitter, dan Zoom Meeting untuk acara kumpul dan rapat; dan menggunakan media cetak seperti baliho, spanduk, dan poster untuk menggugah minat membaca masyarakat. Meski penulis terlibat dengan banyak media KPU Kota Batam, Facebook kerap digunakan untuk memverifikasi keakuratan berita yang diberitakan KPU Kota Batam. KPU mampu melakukan upaya yang lebih efisien dan

berhasil karena masyarakat Batam umumnya lebih memahami Facebook. Secara keseluruhan, Facebook lebih memberdayakan dan efisien.

### 3.4 Fungsi Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu

Untuk menjamin terselenggaranya pemilu secara langsung, demokratis, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil, KPU dalam hal ini mendapat bantuan dari Bawaslu, dan Panitia Pengawas Pemilu. secara resmi dikenal sebagai Panwaslu. Ikuti semua persyaratan yang berlaku. Pemantauan untuk mendeteksi dan menghindari pelanggaran. Politik uang dan kampanye terlarang menjadi fokus perhatian penulis di Kota Batam [10]

### 3.5 Memberikan Pendidikan Politik yang Sehat kepada Pemilih

Masyarakat umum sebagai pemilih menjadi sasaran program pendidikan politik yang berupaya meningkatkan pengetahuan dan partisipasinya dalam proses pemilu, khususnya yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Arah Politik Misi KPU adalah mendidik dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang politik agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya[13]. KPU harus mampu mengkomunikasikan informasi mengenai pemilu, cara mengidentifikasi calon pemimpin yang berkualitas, dan manfaat apa saja yang dapat diperoleh masyarakat dalam menjalankan haknya. Sistem ini belum begitu dikenal di kalangan masyarakat umum.

Pemilu yang benar, pemilihan umum yang terkadang bukan merupakan hasil dari kesadaran masyarakat itu sendiri, melainkan dari kekuatan politik uang, atau sekedar mengikuti keputusan orang lain. Dalam masa kampanye, KPU juga bisa mengajarkan kepada masyarakat cara mengenal calon berdasarkan visi dan misinya, yang akan sangat berguna bagi masyarakat dalam menentukan pemilihannya [10]

Faktor-faktor yang menurunkan keterlibatan politik masyarakat, khususnya memilih dalam pemilu, terlihat pada penyelenggaraan pemilu ada di setiap daerah, khususnya di Kota Batam. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mensosialisasikan berfungsinya sistem pemilu, baik pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah, merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keterlibatan politik masyarakat. KPU sangat penting bagi terwujudnya demokrasi fungsional suatu negara, khususnya di Indonesia [14]

Kekhawatiran muncul mengenai hubungan antara pengetahuan politik dan kepercayaan pemerintah. Semakin besar pemahaman politik dan kepercayaan warga negara terhadap pemerintah, semakin besar pula keterlibatan politiknya. Demikian pula, jika keterlibatan politik dan

kepercayaan terhadap pemerintah rendah, maka masyarakat tidak akan tertarik untuk berpartisipasi dalam politik. Dengan kata lain, pengetahuan politik dan keyakinan terhadap pemerintahan atau sistem politik menentukan sejauh mana keterlibatan politik seseorang. Karena kerangka keterlibatan politik, demokrasi, dan legitimasi saling terkait, partisipasi politik terkait langsung dengan demokrasi dan legitimasi. Dalam kaitannya dengan demokrasi, keterlibatan politik mempengaruhi legitimasi jalannya pemerintahan [12]

Dalam sistem demokrasi, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hak politik bagi seluruh warga negara. Partisipasi politik merupakan cerminan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan politik untuk memajukan pemerintahan yang baik. Budaya politik para peserta berpotensi meningkatkan kualitas pemilu secara signifikan. Keterlibatan aktif Masyarakat dalam pemilu mencerminkan budaya politik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan [15].

Terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi peranan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kota Batam.

#### 1. Kesadaran Masyarakat Terhadap Politik

Salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap Pemilu Legislatif, padahal pemilu merupakan hal yang krusial karena akan menentukan pemimpin politik yang akan mewakili aspirasi masyarakat dalam 5 (lima) tahun ke depan. Masyarakat beranggapan bahwa segala sesuatunya tetap sama dari awal kampanye hingga akhir pemilu, sehingga sebagian masyarakat mengabaikan pemilu. Masyarakat sangat murung terhadap hasil pemilu dan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan calon legislatif; Hal inilah yang membuat masyarakat kurang berminat untuk memilih dalam pemilu.

Masyarakat percaya bahwa kampanye ini sudah dimulai sejak lama. Karena tidak ada perubahan sampai pemilu final, beberapa orang memilih untuk mengabaikan pemilu. Masyarakat sangat murung terhadap hasil pemilu dan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan calon legislatif. Hal inilah yang membuat masyarakat kurang berminat untuk memilih pada pemilu. Keterlibatan politik merupakan komponen penting dalam demokrasi.

Keterlibatan politik merupakan salah satu ciri modernitas politik. Keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah mempunyai dampak terhadap kehidupan warga negaranya. Namun di dalam keterlibatan politik di Kota Batam tetap dilaksanakan. Jumlahnya tidak mencukupi karena KPU belum menargetkan secara tuntas. RI sebanding dengan rata-rata nasional. Namun berkat

upaya KPU Kota Batam ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pemilih dan pemahaman politik di masyarakat.

## 2. Mobilitas Akses Daerah Terpencil

Masih banyak daerah terpencil di Kota Batam yang sulit dijangkau kendaraan. Menurut peneliti, hal ini menyulitkan panitia pemilihan umum dan masyarakat yang menilai hal ini sangat tidak efisien karena harus mengeluarkan biaya yang sangat besar pada saat pemilu, sehingga pemilu menjadi tidak ideal. Hal ini mencegah pengalihan hak pilih kelompok pedesaan.

## Kesimpulan

Tingkat partisipasi politik Masyarakat kota Batam bisa dikatakan kurang stabil setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya angkat golput yang cenderung berubah-ubah. Adanya golput sebagai bentuk dari sikap apatis Masyarakat batam terhadap politik. Rendahnya kesadaran politik masyarakat kurangnya literasi politik masyarakat, tidak efektifnya upaya sosialisasi yang dilakukan KPU, belum terjaminnya legitimasi calon, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keterlibatan politik masyarakat. Oleh karena itu, peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat penting dalam upaya meningkatkan dan menstabilkan keterlibatan politik masyarakat, salah satunya dengan memberikan informasi tentang Pendidikan Politik kepada masyarakat.

## Referensi

- [1] F. A. Al Tariq, "Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur," *J. Polit. Sci.*, 2020, [Online]. Available: <http://eprints.ipdn.ac.id/7328/>
- [2] L. Y. Dewi, H. L. N. Sinaga, N. A. Pratiwi, and N. Widiyasono, "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput," *J. Ilmu Polit. Dan Pemerintah.*, vol. 8, no. 1, pp. 37–47, 2022, [Online]. Available: <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/download/4082/2190>
- [3] S. T. T. Marzuki, "The Roles of General Election Commission and General Election Supervisory Board for a Democratic Election," *J. Huk. IUS QUIA IUSTUM*, vol. 15, no. 3, 2009, [Online]. Available: <https://jurnal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/535>
- [4] S. Halilah, "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput," *J. Huk. Tata Negara*, vol. 5, no. 2, pp. 78–93, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/470/382/>
- [5] A. N. S. Ahmad Nazir, Iman Lubis, "The Role of Democracy Volunteers in Increasing Community Participation in the 2019 Election at the KPU, Tangerang City," *Atl. Press*, 2021, [Online]. Available: <https://www.atlantispress.com/proceedings/icorsh-20/125962317>
- [6] W. T. Hardianto, A. P. Sili, and F. Firdausi, "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kpu Kota Batu)," *J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 11, no. 2, 2022, [Online]. Available: <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2508>
- [7] J. W. Cresswell, *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- [8] C. Levitt, H. M., Bamberg, M., Creswell, J. W., Frost, D. M., Josselson, R., & Suárez-Orozco, "Journal Article Reporting Standards for Qualitative Primary, Qualitative Meta-Analytic, and Mixed Methods Research in Psychology: The APA Publications and Communications Board Task Force Report," *Am. Psychol.*, vol. 73, no. 1, pp. 26–46, 2018, doi: <https://doi.org/10.1037/amp0000151>.
- [9] H. L. Dedi Amrizal, Yusriati Yusriati, "The Role of General Election Commission (KPU) in Increasing Voters' Participation in Langkat, Medan, Indonesia," *Budapest Int. Res. Critics Institute-Journal*, vol. 1, no. 2, 2018, doi: <https://doi.org/10.33258/birci.v1i2.9>.
- [10] D. A. & S. R. M. Nugroho, "Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis," *J. Juristic*, vol. 1, no. 01, p. 22, 2020, doi: <https://doi.org/10.35973/Jrs.V1i01.1449>.
- [11] P. Gleko, A. Suprojo, and A. W. Lestari, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah," *J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 6, no. 1, 2017, [Online]. Available: <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/367>
- [12] I. A. . A. N. R. U. I. S. Y. S. E. . and U. P. I. Pangestu, "The Regional General Election Commission's Role in Increasing Political Participation in Bandung Society.," *J. Sos. Dan Hum.*, vol. 12, no. 1, pp. 24–33, 2022, doi: <https://doi.org/10.31940/Soshum.V12i1.24-33>.

- [13] Is. Kusmiati, P. Juliati, F. Rahmawati, Marezka, Lasmini, and G. S. Gotfridus, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024,” *Karimah Tauhid*, vol. 3, no. 4, pp. 4107–4118, 2024, [Online]. Available: <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/12693/4851>
- [14] N. Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput,” *J. Ilmu Polit. Dan Pemerintah.*, vol. 8, no. 1, 2022, doi: <https://doi.org/10.37058/Jipp.V8i1.4082>.
- [15] N. K. Arniti, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar,” *J. Ilm. Din. Sos.*, vol. 4, no. 2, pp. 329–348, 2020, [Online]. Available: <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/download/2496/727/5860>



© 2024 by the authors. Licensee Administro Journal

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).